

DAFTAR ISI

Halaman

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Kerangka Pemikiran.....	9
F. Metode Penelitian.....	15
1. Spesifikasi Penelitian	15
2. Metode Pendekatan.	16
3. Tahap Penelitian.....	17
4. Teknik Pengumpulan Data.....	19
5. Alat Pengumpulan Data	20
6. Analisis Data	20
7. Lokasi Penelitian.....	21

BAB II TINJAUAN TEORITIS MENGENAI PELAKSANAAN IZIN OPERASIONAL TRANSPORTASI ONLINE

A. Tinjauan Mengenai Ruang Lingkup Perizinan	22
1. Istilah Perizinan.....	22

2. Fungsi Izin.....	27
3. Tujuan Pemberian Izin	29
B. Aspek Hukum Pembangunan.....	33
1. Pengangkutan dan Angkutan.....	33
2. Asas Hukum Pengangkutan	35
3. Kategori Pengangkutan	42
4. Usaha Pengangkutan	42
C. Tansportasi <i>Online</i>	44
1. Peristilahan Transportasi <i>Online</i>	44
2. Legalitas Transportasi <i>Online</i>	46

BAB III PERATURAN DAN PELAKSANAAN IZIN OPERASIONAL TRANSPORTASI *ONLINE*

A. Kedudukan Perusahaan Pelayanan Jasa Transportasi <i>Online</i>	48
1. Kendaraan Bermotor Umum.....	48
2. Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum.....	49
B. Surat Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Um.302/1/21/Phb/2015 Tentang Uji Materiil Terhadap Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2017.....	54
C. Putusan Mahkamah Agung Nomor 37/P/HUM/2017 Mengenai Uji Materil Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum.....	57

D. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek	63
--	----

BAB IV ANALISA TERHADAP PERATURAN DAN PELAKSANAAN IZIN OPERASIONAL TRANSPORTASI *ONLINE*

A. Kerangka Hukum Penyelenggaraan Jasa Tansportasi di Indonesia.....	71
1. Peraturan Perundang-Undangan terkait dengan Pelayanan Jasa Transportasi <i>Online</i>	71
2. Analisa Terhadap Permenhub Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek	78
B. Pemerintah Sebagai Pihak Penyelenggaraan Sistem Transportasi	85
1. Kewajiban Pemerintah dalam Penyelenggaraan Pengangkutan Umum.....	85
2. Tinjauan Kewenangan Kementerian Perhubungan	92
3. Analisa Kebijakan Perizinan terhadap Sektor Transportasi <i>Online</i>	96

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	100
B. Saran.....	102

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN